



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAFIDZ MUKSIN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 214306

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/90 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/90 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO FINO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANSA MINIBUS MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.650.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 80.275.133**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.305.925.133



III. HUTANG

Rp.

66.250.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.239.675.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.